

PENGATURAN DAN ASPEK HUKUM BADAN-BADAN  
USAHA DI INDONESIA



Oleh :

HERNI WIDANARTI, SH

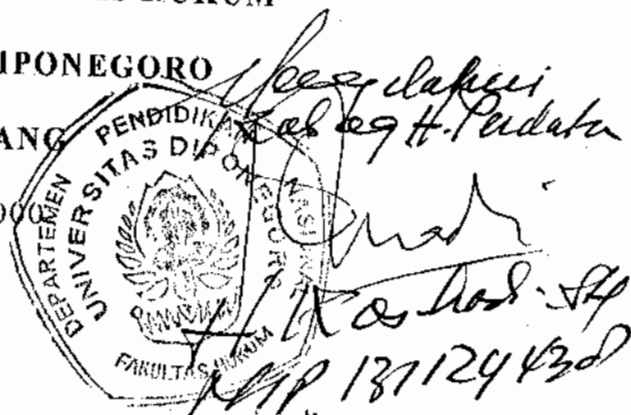
NIP. 131 835 922

TELAH DIDISKUSIKAN PADA BAGIAN HUKUM  
KEPERDATAAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

MEI 2000



## **PENGATURAN DAN ASPEK HUKUM BADAN-BADAN USAHA DI INDONESIA**

### **I. PENDAHULUAN**

Sumber hukum perusahaan adalah KUH Dagang, selain itu KUH Perdata juga menjadi sumber hukum perusahaan, hal tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 KUHD yang menyatakan bahwa KUH Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam kitab undang-undang ini, sepanjang dalam kitab undang-undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang. Berlakunya KUH Perdata terhadap semua perjanjian dapat diketahui berdasarkan ketentuan pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian baik yang bernama maupun tidak bernama tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat dalam bab ini dari bab yang lalu. Adapun yang dimaksud dengan bab ini adalah bab kedua tentang perikatan yang timbul dari perjanjian, sedangkan yang dimaksud bab yang lalu adalah bab kesatu tentang perikatan pada umumnya, keduanya termuat dalam buku III KUH Perdata yang mengatur perikatan.

Hukum perusahaan juga diatur di luar perundang-undangan dalam KUH Perdata dan KUHD sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perusahaan, undang-undang itu antara lain UU No. 1/1967 tentang PMA, UU No. 7/1992 tentang perbankan, UU No. 25/1992 tentang kebiasaan merupakan sumber hukum yang diikuti oleh para pengusaha, karena tidak semua undang-undang mengatur mengenai perusahaan secara lengkap, jika tidak ada pengaturannya, maka kebiasaan yang berlaku di kalangan pengusaha mengenai perbuatan perusahaan tertentu diikuti guna mencapai tujuan yang telah disepakati.

Sumber hukum yang lain adalah yurisprudensi yang dapat diikuti mengenai perbuatan tertentu, dalam yurisprudensi itu kepulauan yang telah ditetapkan oleh hakim dipandang sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan suatu kewajiban.

Pengaturan tentang badan usaha milik Negara, swasta dan perorangan yang bergerak dalam kegiatan ekonomi, diuraikan secara umum, sedangkan pengaturan perbankan sebagai focus pembahasan ini dilakukan secara khusus.

## II. PERUSAHAAN :

Pengertian perusahaan tercantum dalam pasal 1 huruf (b), huruf (d) dan huruf (c) Undang-Undang No.3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. **Perusahaan** adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, **Usaha** adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, **Pengusaha** adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan, pengertian perusahaan tersimpul 2 (dua) hal yaitu :

- a) Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha
- b) Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.

Dalam rumusan pengertian perusahaan, setiap unsur mengandung segi-segi hukum yang diatur oleh undang-undang, segi hukum itu meliputi aspek-aspek :

### (1) Badan Usaha :

Setiap perusahaan mempunyai bentuk hukum yang diakui oleh undang-undang, bentuk hukum itu menunjukkan legalitas perusahaan itu sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi, bentuk hukum itu secara formal termuat dalam akta pendirian atau surat izin usaha.

(2) **Kegiatan dalam bidang ekonomi :**

Kegiatan itu harus halal, artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan. Kegiatan itu tidak dilakukan dengan cara melawan hukum.

(3) **Terus menerus :**

Kegiatan itu dijalankan sebagai mata pencaharian, dengan demikian kegiatan dijalankan untuk jangka waktu lama yang telah ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha. Legalitas berjalannya perusahaan selama jangka waktu yang ditetapkan itu.

(4) **Terang-terangan :**

Pengakuan dan pembenaran itu dilakukan oleh pemerintah melalui perbuatan hukum pengesahan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian, penerbitan surat izin usaha, penerbitan tempat usaha dan sertifikat pendaftaran usaha.

(5) **Keuntungan dan atau laba :**

Keuntungan dan atau laba ini harus diperoleh berdasarkan legalitas dan ketentuan undang-undang artinya bukan hasil yang diperoleh secara melawan hukum.

## **II.1. PERUSAHAAN NEGARA :**

Pasal 1 Undang-Undang No.9/1969, bahwa kecuali dengan atau berdasarkan undang-undang, usaha-usaha negara berbentuk perusahaan dibedakan dalam (1) Perusahaan jawatan, disingkat Perjan (2) Perusahaan Umum, disingkat Perum, (3) Perusahaan Perseroan disingkat Pesero, perusahaan-perusahaan negara sebagai unit ekonomi yang tidak terpisah dari sistem ekonomi Indonesia dan tidak diatur didalam KUHD tetapi diatur didalam berbagai aturan khusus<sup>11)</sup> berdasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia, maka perusahaan negara dibagi dalam :

---

<sup>11)</sup> Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro : 181

### **II.1.1. Perusahaan Jawatan ( Perjan) :**

Semua perusahaan yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan Indonesische Bedrijvenwet (Stbl, 1927 :419) dan telah banyak mengalami perubahan dalam tahun 1929, 1936, 1954 dan tahun 1955, perusahaan ini dinamakan PERJAN.

Melihat dasar pembentukannya, perusahaan IBW terletak pada bidang hukum publik, khususnya hukum Administrasi Negara, dan tidak diberi bentuk badan hukum publik maupun privat oleh perundang-undangan yang berlaku, tetapi hubungan perusahaan dengan pihak ketiga dapat merupakan tindakan dalam hukum perdata, karena untuk dapat melakukan tidak perlu berbentuk badan hukum<sup>12)</sup>

Kegiatannya pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak semata-mata mencari keuntungan, memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomi, modal Perjan termasuk dari anggaran belanja yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan.

**Contoh :** Perjan PJKA, pada zaman Hindia Belanda perusahaan ini berstatus IBW (Stbl, 1939-556), pada tahun 1963 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Negara dengan Undang-Undang No.19 Prp Tahun 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.222 Tahun 1963 status Perusahaan Negara ini kemudian dialihkan menjadi Perjan, dengan PP tanggal 15 September 1971 sekarang dikenal dengan nama PJKA.

### **II.1.2. Perusahaan Umum (Perum):**

Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No.19 Prp Tahun 1960, seluruh modalnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan yang tidak dibagi atas saham-saham, ciri-ciri Perum adalah :

---

<sup>12)</sup> Ibid :182

- (1) melayani kepentingan umum sekaligus untuk memupuk keuntungan, usaha dijalankan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomis
- (2) berbentuk badan hukum dan diatur berdasarkan Undang-Undang
- (3) bergerak dibidang jasa-jasa vital
- (4) mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta, untuk mengadakan atau masuk kedalam perjanjian, kontrak-kontrak dan hubungan dengan pihak lain.

#### **II.1.3. Perusahaan Perseroan (Pesero) :**

Perusahaan Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas yang diatur menurut KUHD, baik yang saham-sahamnya untuk seluruhnya maupun untuk sebagiannya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, Pesero ini mempunyai ciri-ciri antara lain :

- (1) berstatus sebagai badan hukum perdata
- (2) hubungan-hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata
- (3) sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri untuk mencari keuntungan dalam arti tanpa memperoleh fasilitas-fasilitas negara
- (4) peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham dalam suatu perusahaan
- (5) dimungkinkan adanya joint atau Mixed Interprise dengan pihak swasta (nasional atau asing), serta dijualnya saham-saham perusahaan milik negara.

## **II.2. PERUSAHAAN PERSEORANGAN**

### **II.2.1. Pengertian dan Jenisnya**

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh seorang pengusaha, yang meliputi jenis perusahaan Dagang, Perusahaan

Jasa, dan Perusahaan Industri. Perusahaan Dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha dagang. Pengertian pokok "dagang" adalah perbuatan membeli dan menjual/menyewakan barang dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Perusahaan Dagang merupakan bentuk perusahaan perseorangan yang paling banyak dikenal dan dijumpai dalam masyarakat. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penggunaan jasa dengan alat bantu yang bertujuan memperoleh imbalan berupa uang. Perusahaan Jasa merupakan perusahaan perseorangan yang menempati urutan kedua yang banyak dijumpai dalam masyarakat, sesudah Perusahaan Dagang. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha membuat atau menghasilkan/ memproduksi barang-barang untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Perusahaan perseorangan didirikan oleh seseorang pengusaha yang mempunyai cukup modal untuk berusaha. Pada perusahaan perseorangan pengusaha merangkap pemimpin perusahaan. Jika modalnya kecil ia bekerja sendiri. Jika modalnya besar dan usahanya cukup luas, pengusaha mempekerjakan beberapa orang pembantu pengusaha.

#### **II.2.2. Cara Mendirikan Perusahaan Perseorangan**

Hingga sekarang belum ada undang-undang yang mengatur tentang pendirian perusahaan perseorangan, namun berdasarkan pengalaman kami sebagai Loan Officer Bank BPD Jateng bekerja sama dengan PT Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (UPPINDO) diwajibkan bagi calon debitur untuk membuat akta pendirian perusahaan, akta tersebut tidak perlu didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan dan tidak perlu

diumumkan dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara.

Setelah memperoleh akta pendirian dari notaris, pengusaha tersebut menghadap Kepala Kantor Departemen Perdagangan /Perindustrian setempat untuk memperoleh izin usaha. Kemudian ia menghadap Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah setempat untuk memperoleh surat izin tempat usaha jika perusahaan yang bersangkutan itu menurut undang-undang diharuskan memiliki tempat usaha.

Jika syarat-syarat itu sudah dipenuhi, barulah pengusaha yang bersangkutan mendaftarkan perusahaannya pada Kantor Departemen Perdagangan setempat.

### **II.3. PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)**

#### **II.3.1 Pengertian Persekutuan Firma**

Persekutuan Firma adalah setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (pasal 16 KUHD). Sedangkan yang dimaksud dengan persekutuan perdata ialah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya (Pasal 1618 KUH Perdata). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Persekutuan Firma mengandung unsur-unsur pokok berikut ini :

1. Persekutuan perdata (pasal 1618 KUH Perdata);
2. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD);
3. Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD);
4. Tanggung jawab sekutu (firman) bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).

#### **II.3.2 Penggunaan Nama Bersama**



Firma artinya nama bersama. Penggunaan nama bersama untuk nama perusahaan dapat dilakukan dengan cara berikut :

1. Nama seorang sekutu, misal Firma Abdullah;
2. Nama seorang sekutu dengan tambahan, misalnya Firma Ibrahim Aboud and Brother, disingkat Fa. Ibrahim Aboud & Bros, artinya perusahaan persekutuan ini beranggotakan Ibrahim Aboud serta saudara-saudaranya;
3. Kumpulan nama semua sekutu, misalnya Firma Astra (Astra kumpulan nama Ali, Sumarni, Tontowi, Rafi'ah, Arnida);
4. Nama lain berupa tujuan perusahaan, misalnya Firma Ayam Buras, yang berusaha di bidang ternak ayam bukan ras.

Pada Persekutuan Firma kepribadian para sekutu sangat diutamakan, yaitu kepribadian yang bersifat kekeluargaan. Hal ini dapat dimaklumi karena sekutu dalam Persekutuan Firma adalah anggota keluarga, teman sejawat, sahabat karib, yang bekerjasama mencari keuntungan bersama dengan tanggung jawab bersama.

### **II.3.3 Cara Mendirikan Persekutuan Firma.**

Persekutuan Firma harus didirikan dengan akta otentik (pasal 22 KUHD), yang dibuat di muka notaris. Akta Pendirian ini memuat anggaran dasar Firma dengan rincian isi berikut ini (Pasal 26 KUHD) :

1. Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu;
2. Penetapan nama bersama atau firma;
3. Persekutuan Firma itu bersifat umum atau terbatas pada menjalankan perusahaan bidang tertentu;

4. Nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian bagi Persekutuan Firma;
5. Saat mulai dan berakhirnya Persekutuan Firma;
6. Ketentuan-ketentuan lain mengenai hak, pihak ketiga terhadap para sekutu.

Akta Pendirian itu kemudian harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana Persekutuan Firma itu berdomisili (Pasal 23 KUHD). Setelah itu akta pendirian harus diumumkan dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara (Pasal 28 KUHD). Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan, maka pihak ketiga menganggap firma itu sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala macam usaha, didirikan untuk waktu tidak terbatas, semua sekutu wenang menandatangani surat untuk firma itu (Pasal 29 KUHD).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Persekutuan Firma bukan badan hukum. Alasannya ialah tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman dan tidak ada pula keharusan pemisahan harta kekayaan anatar persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Untuk memulai usaha, sekutu pendiri harus memperoleh surat izin usaha dari Kantor Departemen Perdagangan setempat, bila diperlukan surat izin tempat usaha dari Pemerintah Daerah Tingkat II setempat. Setelah Firma menjalankan usahanya paling lambat tiga bulan sejak usaha berjalan sekutu pendiri wajib mendaftarkan Persekutuan Firma pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kanwil Departemen Perdagangan setempat (Pasal 10 UWDP No.3 Tahun 1982).

## **II.4. PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)**

### **II.4.1. Pengertian Persekutuan Komanditer**

Persekutuan Komanditer adalah Persekutuan Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Ia hanya memperoleh keuntungan dari pemasukannya itu. Persekutuan Komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu "sekutu komplementer" yang menjadi pengurus persekutuan atau disebut sekutu aktif, dan "sekutu komanditer" yang tidak mengurus persekutuan atau disebut sekutu pasif. Dua macam sekutu ini menyerahkan pemasukan pada persekutuan secara bersama-sama untuk memperoleh keuntungan bersama, dan kerugian dipikul bersama seimbang dengan pemasukannya.

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 19 sampai dengan 21 KUHD yang mengatur tentang Firma jelaslah bahwa Persekutuan Komanditer adalah Persekutuan Firma bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada adanya sekutu komanditer, yang tidak ada pada Persekutuan Firma. Persekutuan Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut firmant.

### **II.4.2. Cara Mendirikan Persekutuan Komanditer**

Dalam KUHD tidak ada pengaturan secara khusus mengenai cara mendirikan Persekutuan Komanditer, karena Persekutuan Komanditer adalah Persekutuan Firma, maka Pasal 22 KUHD dapat diberlakukan. Dengan demikian, Persekutuan Komanditer didirikan dengan akta notaris yang berupa akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Akta pendirian kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Akta pendirian yang sudah diaftarkan itu

diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Sama halnya dengan Firma, syarat pengesahan dari Menteri Kehakiman tidak diperlukan, karena itu dapat dinyatakan bahwa Persekutuan Komanditer "bukan badan hukum. Hal ini dapat diketahui dari praktek perusahaan Persekutuan Komanditer di Indonesia.

Dilihat dari hubungan dengan pihak ketiga, Persekutuan Komanditer dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu (a) Persekutuan Komanditer diam-diam, (b) Persekutuan Komanditer terang-terangan, (c) Persekutuan Komanditer dengan saham. Setiap jenis diuraikan sebagai berikut :

✎ (a) **Persekutuan Komanditer diam-diam,**

Pihak ketiga mengetahui persekutuan ini sebagai Firma tetapi mempunyai sekutu komanditer. Hubungan keluar menggunakan nama Firma, sedangkan hubungan ke dalam antar sekutu berlaku hubungan sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Persekutuan Komanditer diam-diam dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 19 sampai dengan 21 KUHD. Dengan demikian, KUHD tidak melarang adanya Persekutuan Komanditer diam-diam.

(b) **Persekutuan Komanditer terang-terangan.**

Pihak ketiga mengetahui secara terang-terangan bahwa persekutuan ini adalah Persekutuan Komanditer. Hal ini dapat diketahui dari merk kantor, surat keluar dan masuk, penggunaan nama Persekutuan Komanditer, misalnya CV. Musi Jaya. Persekutuan Komanditer terang-terangan tidak diatur secara khusus dalam KUHD, sebab Persekutuan Komanditer pada hakekatnya adalah Persekutuan Firma dalam bentuk khusus. Jadi, dapat diikuti ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Persekutuan Firma.

**(c) Persekutuan Komanditer dengan saham**

Modal Persekutuan Komanditer dibagi atas saham-saham. Persekutuan semacam ini tidak diatur dalam KUHD, tetapi tidak dilarang oleh undang-undang. Pembentukan modal dengan menerbitkan saham diperbolehkan (Pasal 1337 KUHPdt). Sifat kepribadian kekeluargaan pada Persekutuan Komanditer dengan saham mulai mengendor jika dibandingkan dengan Persekutuan Komanditer terang-terangan yang pada hakekatnya adalah Firma. Hal ini dapat dibuktikan dari saham yang dapat diperalihkan kepada pihak lain yang bukan keluarga, bukan kerabat dekat, bukan teman karib.

Persekutuan Komanditer dengan saham adalah bentuk peralihan dari Persekutuan Komanditer kepada Perseroan Terbatas (PT). Persekutuan Komanditer ternyata telah mendesak Persekutuan Firma dalam praktek perusahaan di Indonesia. Hal ini mungkin terjadi karena keadaan yang menghendaki supaya pihak luar yang bukan anggota keluarga atau bukan teman karib dapat bergabung dengan persekutuan yang masih memerlukan tambahan modal. Disamping itu, persekutuan tidak perlu menggunakan nama bersama.

**II.5. PERSEROAN TERBATAS :**

Pada tanggal 7 Maret 1995 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) dengan demikian maka (1) Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, ini berarti ia akan mulai berlaku tanggal 7 Maret 1996, (2) Buku kesatu, Titel ketiga, Bagian Ketiga, Pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya dan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.4/1971 dinyatakan tidak berlaku (Ps

128 ayat (1)), (3) Terhitung 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, Ordonansi Maskapai Andil Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi (Ps 128 ayat (3)), (4) Perseroan Terbatas (PT) yang sudah ada harus tunduk dan menyesuaikan diri dengan Undang-Undang yang baru.

Kelahiran Undang-Undang Perseroan Terbatas ini dalam pembangunan sekarang sangat penting artinya karena (1) Sebagai langkah pembaharuan hukum karena KUHD sudah tidak lagi dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha, disamping itu (2) Sebagai instrumen yang diadakan untuk mendorong perkembangan ekonomi.

Sedangkan dalam penjelasan umum ditegaskan bahwa di bidang ekonomi sasaran umum pembangunan antara lain diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan nasional adalah ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang menggantikan ketentuan hukum yang lama, dengan ketentuan baru ini diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional, Undang-Undang No.1/1995 mengatur tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

#### **II.5.1. Badan Hukum :**

Untuk mendirikan suatu perseroan ada 4 (4) syarat utama yang wajib dipenuhi oleh pendiri perseroan yaitu (1) dengan perjanjian antara dua orang atau lebih, (2) akta autentik dimuka notaris, (3) modal dasar perseroan, (4) pengambilan saham pada saat perseroan didirikan.

Keempat syarat tersebut merupakan syarat material perseroan, untuk itu dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Perjanjian antara dua orang atau lebih.**

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih, yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan atau badan hukum, ketentuan sekurang-kurangnya dua orang menegaskan prinsip yang dianut oleh UU PT. bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham sebagai pendiri.

Perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengikat para pihak, jika memenuhi 4 (empat) persyaratan utama (Pasal 1320 KUH Perdata) yaitu (1) sepakat dari mereka yang mengikatkan diri, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal.

Perikatan yang memenuhi persyaratan tersebut, secara hukum mengikat para pihak, ia tidak akan berakhir atau diakhiri tanpa persetujuan para pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk membatalkan persetujuan tersebut. Ketentuan minimal dua orang pendiri dalam pasal 7 ayat (1) UU PT. dapat menghambat perkembangan pasar modal karena (1) pendirian perseroan begitu mudah sehingga minat orang pergi ke pasar modal akan melemah (2) bagi perseroan yang akan go public makan waktu yang lama.<sup>15)</sup>

**2. Akta Autentik di muka notaris :**

Pasal 7 ayat (1) UU PT. perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akta autentik dimuka Notaris dalam bahasa Indonesia, perjanjian tersebut merupakan akta pendirian perseroan yang sekaligus memuat Anggaran Dasar yang telah disepakati, sejak akta pendirian

---

<sup>15)</sup> Abdulkadir Muhammad : hal-12

ditanda tangani oleh para pendiri, maka perseroan berdiri, dan hubungan para pendiri dikuasai oleh hukum kontrak, hubungan kontrak tersebut belum menciptakan status badan hukum. Segala akibat hukum yang timbul adalah tanggung jawab para pendiri secara pribadi.

### **3. Modal dasar perseroan**

Pasal 25 UU PT. ditentukan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 20 juta, tetapi undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang melebihi Rp 20 juta, sedangkan dalam pasal 26 UU PT, pada saat pendirian perseroan paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan dan telah disetor paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.

Pasal 21 ayat (1) PP No.20/1994 menyebutkan bahwa jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing ditetapkan sesuai dengan kelayakan ekonomi kegiatan usaha, dengan demikian jumlah modalnya relatif sesuai dengan kegiatan usaha, tetapi dalam praktek modalnya lebih dari Rp. 1 milyar.

### **4. Pengambilan saham pada saat perseroan didirikan**

Pasal 7 ayat (2) UU PT, menyebutkan bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat pesero didirikan, ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian pasal 26 ayat (2) UU. PT.



### **II.5.2. Jangka Waktu**

Pasal 46 KUHD menyatakan tiap-tiap Perseroan Terbatas harus didirikan untuk jangka waktu tertentu, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk memperpanjangnya, tiap-tiap kali setelah lampau waktu itu. Pasal 6 Undang- Undang No. 1 tahun 1965 menyatakan bahwa Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Namun penjelasannya mengatakan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya jangka waktu berdirinya perseroan tidak terbatas, akan tetapi apabila jangka waktu tersebut ingin ditentukan maka hal tersebut harus ditegaskan dalam Anggaran Dasar, namun hal ini cukup membingungkan karena:

- Dalam pasal 12 butir e tentang hal-hal yang sekurang-kurangnya harus termuat dalam Anggaran Dasar adalah jangka waktu berdirinya perseroan.
- Dalam pasal 114 butir b bahwa perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.

### **II.5.3. Kapan Perseroan Terbatas menjadi badan hukum**

Tahapan-tahapan agar perseroan terbatas menjadi badan hukum, **Abdulkadir Muhammad** mengemukakan 5 (lima) tahapan proses prosedur pendirian perseroan yaitu : (1) pembuatan perjanjian tertulis (2) pembuatan akta pendirian (3) pengesahan oleh Menteri Kehakiman (4) pendaftaran perseroan (5) pengumuman dalam tambahan berita negara, sedangkan **Sutantyo R. Hadikusumo dan Sumantoro**, mengemukakan 3 (tiga) tahapan dalam pendirian perseroan terbatas yaitu (1) akta pendirian notaris sampai dengan hari sebelum persetujuan dari Departemen Kehakiman (2) tanggal persetujuan dari Departemen Kehakiman sampai dengan hari

sebelum tanggal pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia (3) dimulai dari tanggal pendaftaran di Pengadilan Negeri setempat dan pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia, atas dasar hal tersebut diatas pada dasarnya hanya ada 3 (tiga) tahapan yaitu :

**1. Pembuatan akta pendirian :**

Akta pendirian harus dibuat dengan akta autentik (akta notaris) bila tidak dilakukan demikian maka akan diancam kebatalannya (pasal 38 ayat (1) KUHD). Oleh karena perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian maka agar dapat memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dibuat perjanjian para pihak, selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 2 ayat (1) UU PT, dalam anggaran dasar tersebut mencantumkan kegiatan perseroan, harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Akta pendirian mempunyai fungsi utama yaitu sebagai aturan main para pemegang saham dan organ perseroan, serta fungsi ekstern terhadap pihak ketiga sebagai identitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berhak atas nama perseroan.<sup>16)</sup>

**2. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman :**

Pasal 9 ayat (1) UU PT, menyebutkan bahwa untuk memperoleh pengesahan harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian pengesahan merupakan pengawasan preventif oleh pemerintah yang dilakukan oleh departemen terkait (pasal 36 ayat (2) KUHD ) tetapi dalam pasal 9 ayat (2) UU PT, untuk

---

<sup>16)</sup> Dikutip dari pendapat Achmad M. Rali dalam buku "Abdulkadir Muhammad" : hal-14

pengesahan Perseroan Terbatas diberikan jangka waktu 60 hari setelah permohonan diterima, mengandung arti pemerintah disamping mengadakan fungsi pengawasan juga memberikan pelayanan yang wajar.

Sejak pengesahan, perseroan adalah badan yang mandiri, mengandung makna tentang tanggung jawab pemegang saham hanya sebesar nilai saham yang diambil, sedangkan tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri dalam kurun waktu antara pendirian dengan pengesahan, menurut ketentuan pasal 11 UU PT, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

### **3. Pendaftaran dan pengumuman.**

Pasal 22 UU PT, perseroan yang telah didaftarkan, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ditentukan bahwa permohonan pengumuman perseroan dilakukan Direksi dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran, sedangkan dalam pasal 38 ayat (2) KUHD pendaftaran dan pengumuman ini merupakan keharusan yang bersanksi.

Pada kurun waktu yang dimulai dari tanggal pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari surat persetujuan Departemen Kehakiman mengenai akta pendirian Perseroan terbatas sejak saat inilah Perseroan Terbatas tersebut merupakan badan hukum yang sempurna.<sup>17)</sup>

Pasal 7 ayat (6) UU PT, dengan tegas menyatakan bahwa perseroan memperoleh

---

<sup>17)</sup> Sutantyo R. Hadikusumo dan Sumantoro : hal-47

3. Alat untuk mencapai tujuan itu ialah badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama, dikelola bersama.
4. Tujuan utama badan usaha itu ialah memajukan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.

Apabila perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus tersebut didaftarkan, sehingga memperoleh pengakuan resmi (sah) dari pemerintah berdasarkan undang-undang perkoperasian, maka perkumpulan itu disebut Koperasi dari segi hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 9 UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

#### **II.6.2. Asas, Tujuan dan Fungsi Koperasi**

Menurut ketentuan Pasal 2 UU No.25 Tahun 1992, Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam pasal tersebut tidak terdapat penjelasan mengenai asas kekeluargaan. Tetapi kekeluargaan dapat diartikan sebagai mencerminkan kesadaran manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam Koperasi oleh semua untuk semua dibawah pimpinan Pengurus, penilikan para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran, keberanian berkorban untuk kepentingan bersama.

Pasal 3 UU No.25 Tahun 1992 menentukan tujuan Koperasi. Menurut ketentuan pasal tersebut, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Alat untuk mencapai tujuan itu ialah badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama, dikelola bersama.
4. Tujuan utama badan usaha itu ialah memajukan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.

Apabila perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus tersebut didaftarkan, sehingga memperoleh pengakuan resmi (sah) dari pemerintah berdasarkan undang-undang perkoperasian, maka perkumpulan itu disebut Koperasi dari segi hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 9 UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

#### **II.6.2. Asas, Tujuan dan Fungsi Koperasi**

Menurut ketentuan Pasal 2 UU No.25 Tahun 1992, Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam pasal tersebut tidak terdapat penjelasan mengenai asas kekeluargaan. Tetapi kekeluargaan dapat diartikan sebagai mencerminkan kesadaran manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam Koperasi oleh semua untuk semua dibawah pimpinan Pengurus, penilikan para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran, keberanian berkorban untuk kepentingan bersama.

Pasal 3 UU No.25 Tahun 1992 menentukan tujuan Koperasi. Menurut ketentuan pasal tersebut, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4 UU No.25 Tahun 1992 menentukan fungsi dan peran Koperasi. Menurut ketentuan pasal tersebut, fungsi dan peran Koperasi adalah :

- (a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- (b) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- (c) memperkokoh perkeonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- (d) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### **II.6.3. Dasar Hukum Koperasi**

Pasal 33 ayat 1 UUD45 menentukan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.

Untuk merealisasikan Pasal 33 ayat (1) UUD45, pembentuk undang-undang telah mengundang Undang-Undang No.12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Kemudian diganti undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Berdasarkan

undang-undang ini, apabila akta pendirian yang memuat anggaran dasar Koperasi disahkan oleh pemerintah, maka Koperasi itu memperoleh status badan hukum.

#### **II.6.4. Cara Mendirikan Koperasi**

Cara Mendirikan Koperasi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan 14 UU No.25 Tahun 1992. Dalam pasal-pasal tersebut diuraikan syarat-syarat, prosedur, dan akibat hukum pendirian Koperasi sebagai berikut ini :

##### **\* Rapat pembentukan Koperasi**

Beberapa orang pendiri (sekurang-kurangnya 20 orang) mengadakan rapat pembentukan Koperasi, dari rapat mana dibuatkan berita acara yang memuat catatan tentang jumlah anggota dan nama mereka yang diberi kuasa untuk menandatangani akta pendirian. Akta pendirian ini memuat anggaran dasar Koperasi yang disusun berdasarkan pedoman dalam Pasal 8 UU No.25 Tahun 1992.

##### **\* Surat permohonan pengesahan**

Para pendiri mengajukan surat permohonan pengesahan pendirian Koperasi, yang dilampiri dengan akta pendirian dan petikan berita acara rapat kepada Pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari Menteri Koperasi. Pada waktu menerima akta pendirian, Pejabat menyerahkan sehelai tanda terima yang bertanggal kepada para pendiri Koperasi.

##### **\* Pengesahan akta pendirian oleh Pejabat**

Jika Pemerintah berpendapat bahwa isi akta pendirian (anggaran dasar) tidak bertentangan dengan undang-undang, maka menurut

ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No.25 Tahun 1992 pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterima permintaan pengesahan.

**\* Pendaftaran akta pendirian**

Akta pendirian yang telah disahkan itu didaftarkan dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu di kantor Pejabat dengan dibubuhi tanggal dan nomor pendaftaran serta tanda pengesahan oleh Pejabat. Tanggal pengesahan akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya Koperasi. Sejak tanggal pengesahan itu, Koperasi yang bersangkutan adalah badan hukum (pasal 9 UU No.25 Tahun 1992).

**\* Pengiriman akta pendirian kepada pendiri**

Akta pendirian yang bermeterai dikirimkan kepada para pendiri untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan akta pendirian yang tidak bermeterai disimpan di kantor Pejabat. Jika ada perbedaan antara dua akta pendirian tersebut, yang disimpan di kantor Pejabat dianggap benar.

**\* Pengumuman dalam Berita Negara**

Setiap akta pendirian yang sudah disahkan itu diumumkan oleh Pejabat dengan menempatkannya dalam Berita Negara. tetapi pengesahan sebagai badan hukum sejak pengesahan akta pendirian, bukan sejak diumumkan dalam Berita Negara

### **III. PENGATURAN LEMBAGA PERBANKAN :**

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian dalam suatu negara, oleh karena peran yang



strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana, maka industri perbankan paling banyak diatur oleh pemerintah.

Menurut **Anwar Nasution** ada 4 (empat) alasan mengapa lembaga perbankan banyak diatur yaitu :

- (1) Untuk menjaga keamanan serta kesehatan lembaga keuangan maupun kesehatan sistim keuangan secara keseluruhan.
- (2) Untuk dapat mengontrol stock jumlah uang beredar dalam menjaga stabilitas tingkat harga
- (3) Adanya anggapan bahwa industri keuangan adalah berbeda dari pada industri lainnya, industri keuangan dianggap merupakan industri yang sangat strategis dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi untuk mewujudkan berbagai sasaran pembangunan nasional
- (4) Perlu diatur lebih dekat dari pada pengaturan pada lembaga ekonomi lainnya adalah untuk memelihara terjadinya persaingan yang sehat dalam industri keuangan.

Lembaga perbankan juga disebut sebagai lembaga perantara karena menghubungkan antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana, secara sederhana Bank membeli dana dari masyarakat dan menjual kembali kedalam masyarakat, selisih antara menjual dan membeli tersebut merupakan keuntungan Bank.

Dalam proses yang demikian inilah Bank perlu diatur dalam suatu peraturan untuk mencapai kemanfaatan yang maksimal dari kegiatan perbankan disatu sisi perbankan harus mampu untuk hidup dan berkembang disisi lain Bank harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengaturannya sesuai dengan Undang-Undang No.7/1992 pada pokoknya meliputi :

- (1) Tata cara pendirian Bank
- (2) Kegiatan usaha
- (3) Likuidasi, merger dan akuisisi.

Dengan kata lain pengaturan tersebut mengatur sejak Bank itu lahir sampai Bank itu dinyatakan ditutup, namun perbankan di Indonesia mempunyai suatu keunikan tersendiri karena Bank-Bank milik pemerintah sebagian besar hasil nasionalisasi Bank-Bank milik orang asing (Belanda) hanya ada satu bank pemerintah secara murni didirikan oleh pemerintah Indonesia yaitu Bank BNI 1946 dan Bank Pembangunan Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang No.13/1962.

Bank swasta ada sejak zaman kolonial, dengan adanya Pakto 1988 Bank swasta tersebut tumbuh dengan pesat, berkenaan dengan kondisi yang demikian itu pengaturan perbankan di Indonesia meliputi :

- (1) Kepemilikan, jenis dan fungsi Bank
- (2) Bentuk Hukum
- (3) Modal
- (4) Organisasi (manajemen)
- (5) Kegiatan usaha Bank :

- (5.1.) Perencanaan
- (5.2.) Penghimpunan dana
- (5.3.) Penyaluran dana
- (5.4.) Pengawasan
- (5.5.) Laporan

- (6) Pengembangan.
- (7) Liquidasi

### **III.1. Kepemilikan :**

Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang No.7/1992 : Bank Umum dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia, hal tersebut dapat ditafsirkan sesuai dengan kenyataan yang ada, maka kepemilikan Bank Umum dimiliki oleh pemerintah/ Pemerintah Daerah Bank milik swasta dan koperasi.

4

Undang-Undang No.15/1967 secara tegas menjelaskan Bank milik negara terdiri dari :

a) **Bank Indonesia dan Bank Umum Milik Negara** yang terdiri dari :

a.1. **Bank Negara Indonesia 1946** yang didirikan dengan Undang-Undang No.17/1968

a.2. **Bank Dagang Negara** yang didirikan dengan Undang-Undang No.18/1968

a.3. **Bank Bumi Daya** yang didirikan dengan Undang-Undang No.19/1968

a.4. **Bank Rakyat Indonesia** yang didirikan dengan Undang-Undang No.21/1968

a.5. **Bank Ekspor Import** yang didirikan dengan Undang-Undang No.22/1968

b. **Bank Tabungan Milik Negara :**

Bank Tabungan Negara yang didirikan dengan Undang-Undang No.20/1968

c. **Bank Pembangunan Milik Negara :**

Bank Pembangunan Indonesia yang didirikan dengan Undang-Undang No.21 Prp Tahun 1960.

d. **Bank Milik Pemerintah Daerah :**

Bank Pembangunan Daerah yang terdapat di setiap Propinsi Daerah Tingkat I yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No.13/1962

e. **Bank Milik Swasta :**

Bank milik swasta dapat dibedakan Bank milik swasta nasional, yaitu Bank yang seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara Indonesia dan Bank swasta asing adalah Bank-Bank yang seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan

hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara asing.

d. **Bank Koperasi :**

Bank koperasi adalah Bank yang modalnya berasal dari kelompok-kelompok koperasi

**III.2. Jenis dan fungsi Bank :**

Undang-Undang No.7/1992 membagi dalam 2 (dua) jenis Bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan dalam Undang-Undang No.14/1967 membagi dalam berbagai jenis Bank, adapun fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dalam Undang-Undang No.44/1967 melihat dari fungsinya dibedakan sebagai berikut :

- (1) **Bank Sentral** ialah Bank Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang No.13/1968 dengan tugas pokoknya mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
- (2) **Bank Umum** ialah Bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
- (3) **Bank Tabungan** ialah Bank dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
- (4) **Bank Pembangunan** ialah Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau pengeluaran kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan.

(5) **Bank Desa** ialah Bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan.

Bentuk-bentuk hukum, modal serta organisasi akan diuraikan dalam bab berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Anwari, Achmad, 1980, *Bank Rekan Terpercaya Dalam Usaha*, Jakarta : Balai Aksara.

Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni.

Sarjana, Aninda, 1993, *Pengantar Operasional Perbankan di Indonesia*, makalah.

Sutantio, Retnowulan, 1995, *Kapita Selekta Hukum Perbankan*, Jakarta : IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI.

Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Grafiti.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Surat Edaran Direktur Bank Indonesia No. 23/ 12/ BPP tanggal 28 Februari 1991 tentang Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan.